



SOSIALISASI

Inpres No. 6 Tahun 2018

Tentang Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika
Di Provinsi Kalimantan Timur



Ka. BNNP KALTIM
BRIGJEN POL Drs. RAJA HARYONO,SH.,M.Hum

Implementasi Inpres No.6 Tahun 2018

INPRES



Mengkoordinasi K/L



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Pengawasan



1. PARA MENTERI KABINET KERJA;
2. SEKRETARIS KABINET;
3. JAKSA AGUNG;
4. KAPOLRI;
5. PANGLIMA TNI;
6. KEPALA BIN;
7. PARA PIMPINAN LPNK;
8. PARA PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA;
9. PARA GUBERNUR; DAN
10. PARA BUPATI/WALIKOTA

MELAKSANAKAN
RAN

MELAPORKAN
HASIL RAN

Pemantauan &
Evaluasi



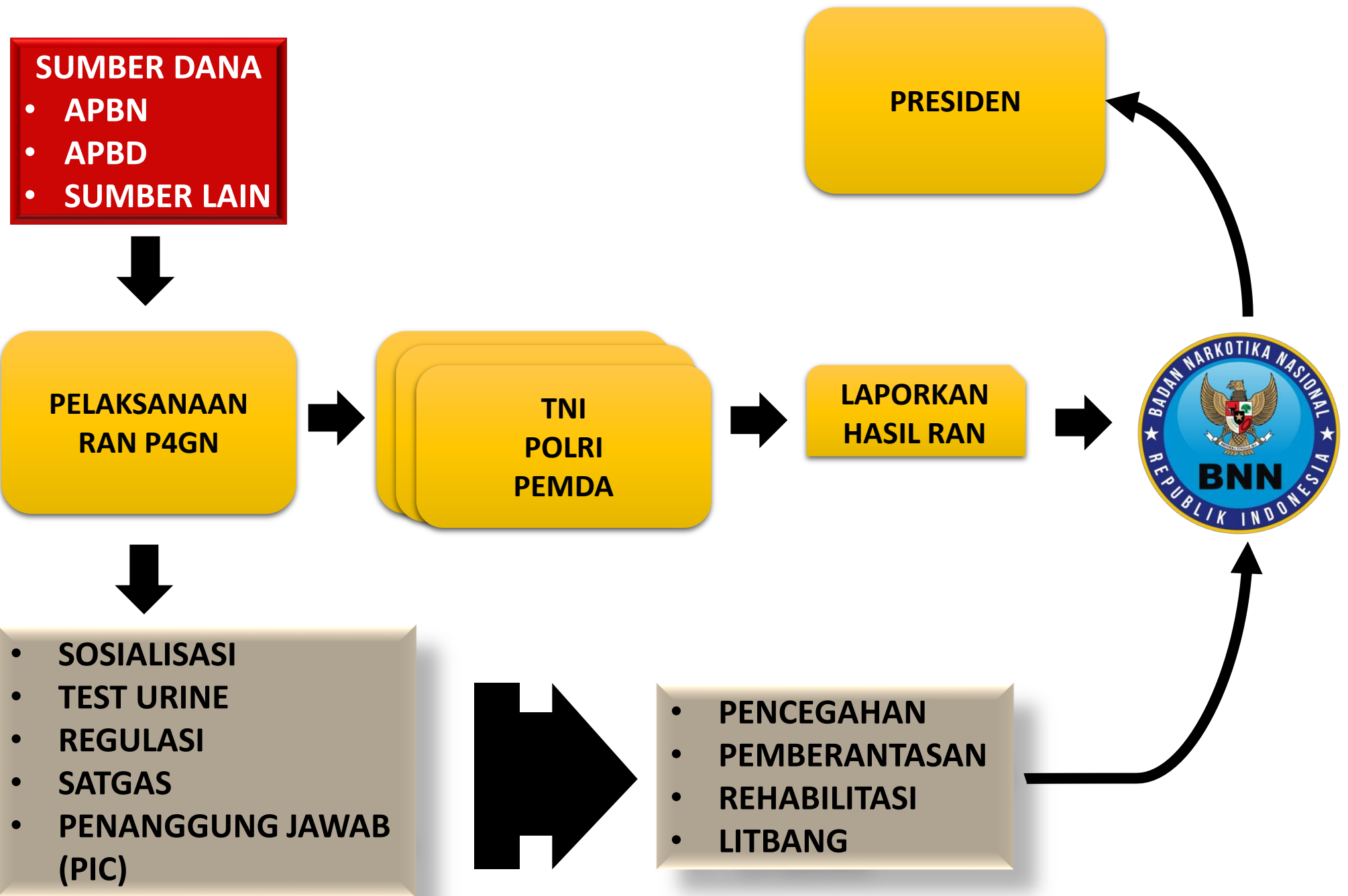
Mengkoordinasi
Pemda

Laporan
Berkala

Fungsi
Koordinasi



KANTOR STAF PRESIDEN



BIDANG PENCEGAHAN

1

1. PENINGKATAN KAMPANYE PUBLIK TENTANG BAHAYA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2. DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
3. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANTI NARKOBA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2

BIDANG PEMBERANTASAN

1. PEMBERSIHAN TEMPAT & KAWASAN RAWAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
2. PENGUATAN PENGAWASAN PINTU MASUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. PEMEBENTUKAN RUMAH TAHANAN NARKOTIKA
4. PENGEMBANGAN SISTEM INTERDIKASI TERPADU

3

BIDANG REHABILITASI

PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN REHABILITASI KORBAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

4

BIDANG LITBANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA & PREKURSOR NARKOTIKA

1. PENGEMBANGAN RISET PERMASALAHAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2. INTEGRASI DATA



**PERATURAN
PEDUKUNG
INPRES NOMOR 6
TAHUN 2018**

- 1. UNDANG – UNDANG 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**
- 2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
- 3. PERKA BNN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
- 4. SE Ka.BNN NOMOR : SE/73/I/IX/KA/PR.00.03/2018/BNN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2018 TENTANG SOSIALISASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RAN P4GN**
- 5. PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**
 - PERATURAN GUBERNUR**
 - PERATURAN BUPATI / WALIKOTA**

Kaltim peringkat ke-3 prevalensi penyalah guna narkoba. (SURVEY 2017)

ANGKA PREVALENSI DAN JUMLAH PENYALAHGUNA
DI 34 PROVINSI, 2017

Provinsi	2017		
	Jumlah Penyalahguna	Prevalensi (%)	Populasi (10-59)
Aceh	63,032	1.69	3,727,800
Sumatera Utara	256,657	2.53	10,137,500
Sumatera Barat	66,612	1.78	3,748,200
Riau	91,415	1.87	4,893,700
Jambi	53,177	2.02	2,626,200
Sumatera Selatan	84,925	1.40	6,053,500
Bengkulu	24,118	1.68	1,436,700
Lampung	116,845	1.94	6,028,700
Bangka Belitung	15,905	1.49	1,065,500
Kepulauan Riau	26,540	1.71	1,556,300
DKI Jakarta	260,656	3.34	7,800,600
Jawa Barat	645,482	1.83	35,242,100
Jawa Tengah	284,186	1.16	24,490,200
DI Yogya	31,973	1.19	2,691,400
Jawa Timur	492,157	1.72	28,622,000
Banten	170,444	1.83	9,296,400
Bali	50,539	1.62	3,128,300
NTB	63,918	1.80	3,556,800
NTT	36,022	0.99	3,639,100
Kalimantan Barat	56,424	1.57	3,592,900

Provinsi	2017		
	Jumlah Penyalahguna	Prevalensi (%)	Populasi (10-59)
Kalimantan Tengah	38,981	1.98	1,967,200
Kalimantan Selatan	59,590	1.87	3,025,600
Kalimantan Timur	43,911	2.12	2,071,436
Kalimantan Utara	12,812	1.87	1,127,864
Sulawesi Utara	30,646	1.71	1,789,600
Sulawesi Tengah	36,594	1.70	2,154,000
Sulawesi Selatan	121,366	1.95	6,237,800
Sulawesi Tenggara	29,012	1.58	1,838,300
Gorontalo	10,244	1.19	860,600
Sulawesi Barat	16,269	1.70	958,100
Maluku	19,573	1.59	1,230,500
Maluku Utara	13,181	1.52	864,800
Papua Barat	11,215	1.64	685,700
Papua	42,492	1.70	2,505,000
INDONESIA	3,376,115	1.77	190,650,400

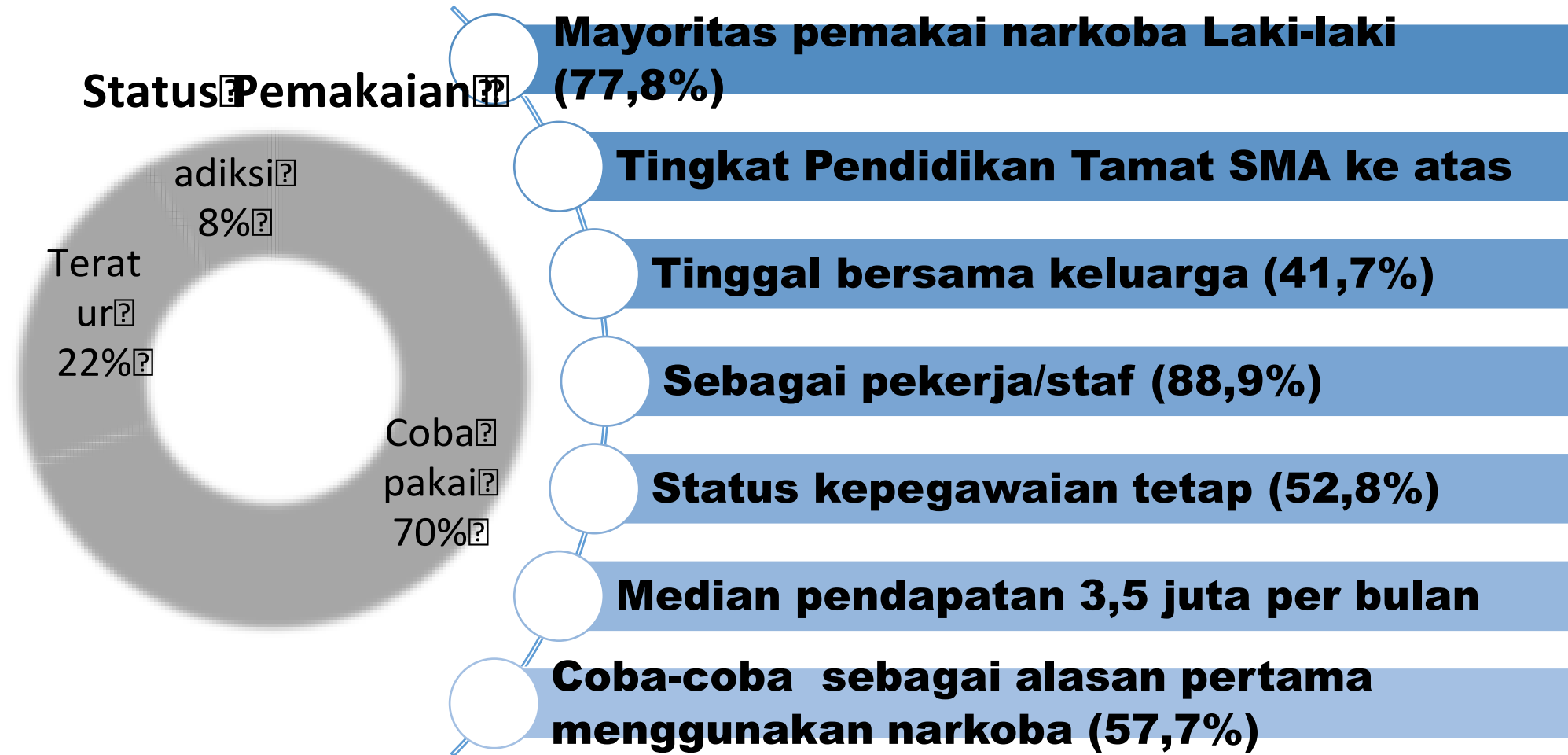
(SURVEY 2018)

PREVALENSI PAKAI NARKOBA SETAHUN TERAKHIR di 13 IBUKOTA PROVINSI

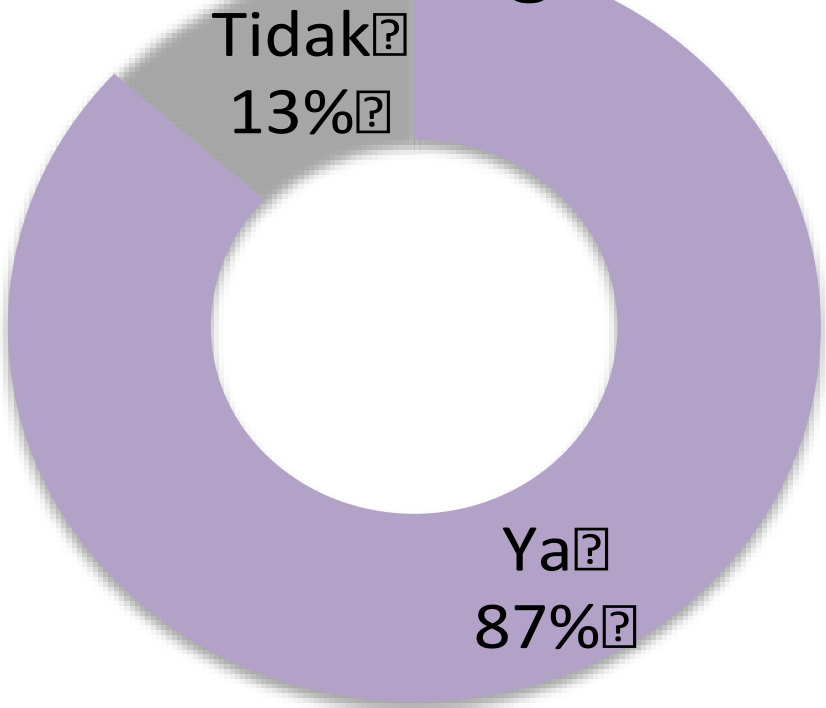
	Angka Prevalensi Pakai Narkoba setahun terakhir	Jumlah Terpapar Narkoba
Aceh	1.80%	38,493
Sumatera Utara	1.50%	95,490
Sumatera Selatan	3.50%	137,989
Kepulauan Riau	1.30%	11,660
DKI Jakarta	1.50%	67,638
Jawa Barat	5.50%	1,130,337
Jawa Timur	2.80%	562,778
DI Yogyakarta	1.30%	26,691
Bali	1.30%	31,178
Kalimantan Timur	2.00%	30,814
Kalimantan Barat	1.00%	23,032
Sulawesi Selatan	2.50%	89,967
Papua	1.30%	22,088
Total	2.10%	1,514,037

- Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Selatan memiliki angka prevalensi tertinggi.
- Prov. Kaltim urutan no. 5 prevalensi diantara 13 Provinsi.**
- Angka prevalensi nasional setahun terakhir 2,1 %, setara dengan 1,51 juta orang (13 provinsi)
- Angka prevalensi penasun setahun terakhir 2% setara dengan 30.814 orang

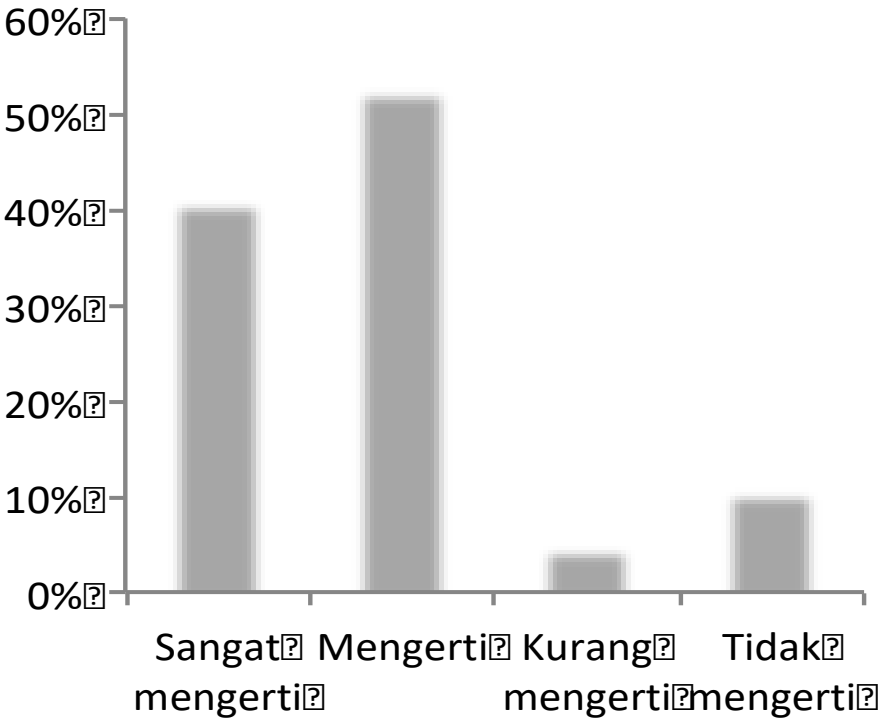
KARAKTERISTIK PEMAKAI NARKOBA



Pernah melihat/
mendengar

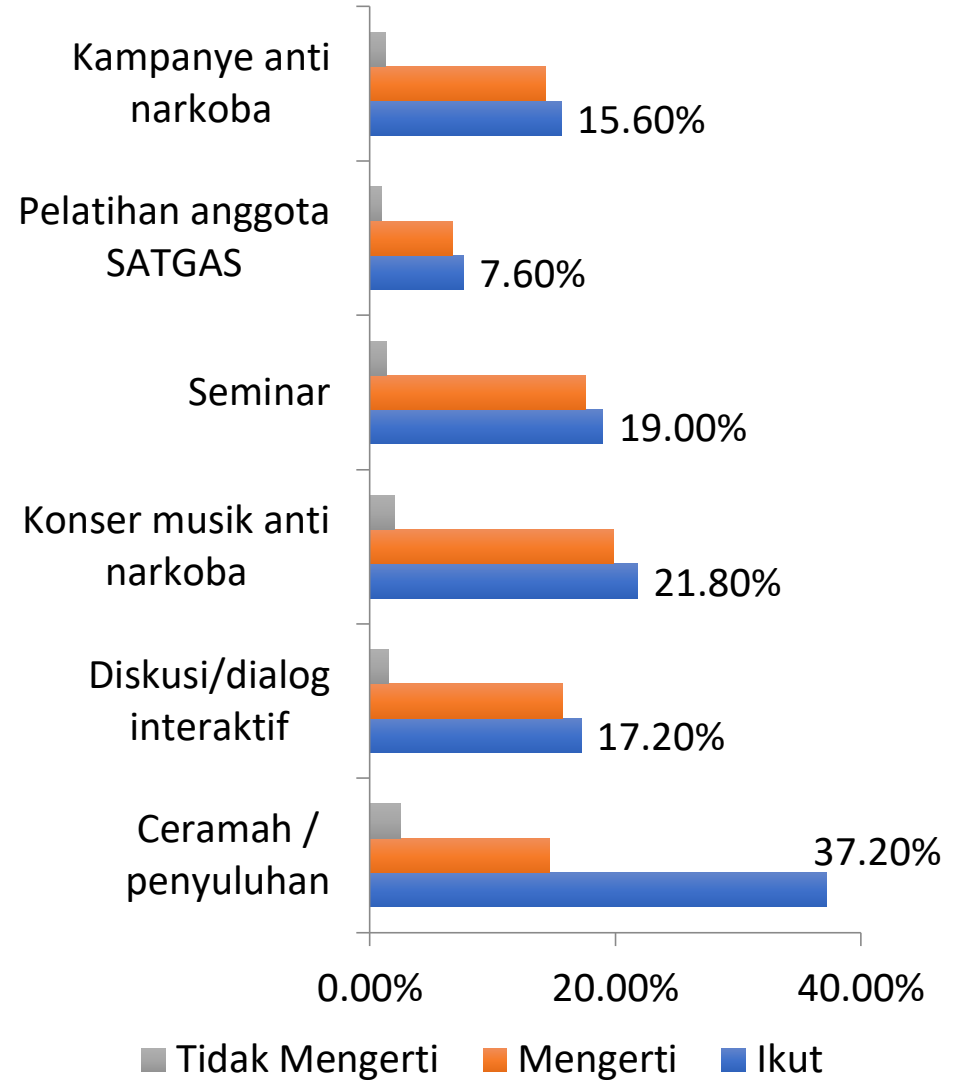


Mengerti pesan



FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PREVALENSI NARKOBA

- **MASIH MINIM** pekerja yang terlibat dalam kegiatan P4GN
- Ceramah/penyuluhan masih menjadi kegiatan yang paling banyak diikuti.
- BNN, Polisi dan Dinkes lembaga yang paling sering melakukan program pencegahan narkoba.
- 69,9 % pekerja tidak mengetahui keberadaan panti rehabilitasi



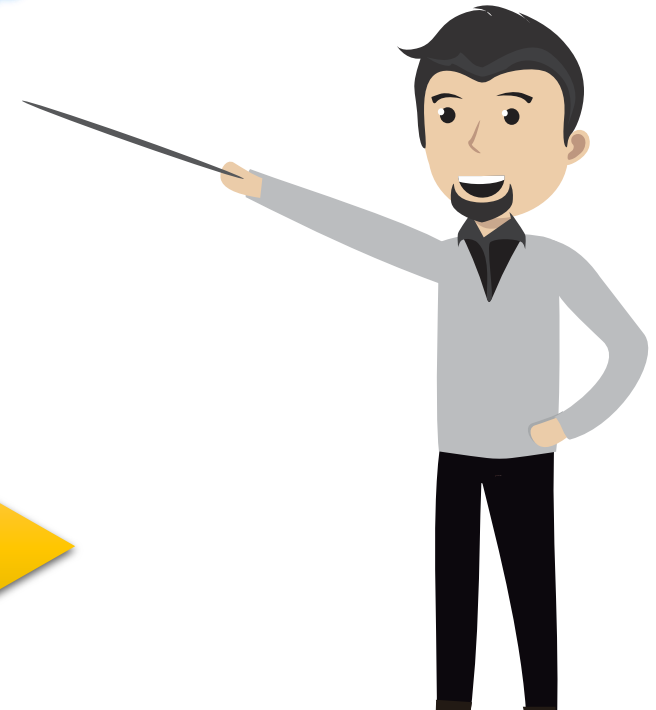
POTRET PERMASALAHAN NARKOBA DI KALTIM

LUAS WILAYAH KALTIM : 129.066 Km / 2

3 BNNK DARI 10 KABUPATEN / KOTA DI KALTIM

POPULASI 2,8 JUTA Jiwa 72 % LAKI-LAKI DAN 28 % WANITA

PREVALENSI PENYALAHGUNA 2,12 % PERINGKAT KE 3 NASIONAL



**PADA TAHUN 2017 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENGELUARKAN PERATURAN DAERAH NO.7 TAHUN 2017
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

KESIMPULAN

1. Terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja, tapi untuk kelompok pelajar/mahasiswa justru terjadi peningkatan.
2. Sebagian besar pekerja dan pelajar/mahasiswa telah mengetahui dampak narkoba thdp kesehatan, juga dampak terhadap ekonomi, namun tetap akan menerima jika ditawari narkoba
3. Sektor Angkutan, Konstruksi dan Jasa perlu lebih diwaspadai karena memilikipeluang keterpaparan narkoba yang tinggi.
4. Beban kerja yang tinggi memiliki hubungan signifikan dengan pemakaian narkoba
5. Masih rendahnya pengetahuan pekerja dan pelajar/mahasiswa tentang keberadaan tempat rehabilitasi

KESIMPULAN

6. Masih banyak pekerja dan pelajar/mahasiswa belum terlibat dalam kegiatan P4GN
7. Media sosial paling tepat untuk menyampaikan program P4GN.
8. Kegiatan keagamaan paling tepat untuk pencegahan narkoba
9. Ada hubungan signifikan antara keterpaparan rumah tangga dengan :
 - keikutsertaan dalam kegiatan pencegahan
 - meluangkan waktu bersama dengan ART
 - mengetahui teman akrab ART
 - Mengetahui perilaku ART di luar rumah
 - melarang ART merokok
 - melarang ART minum minuman beralkohol
 - melarang ART mengunjungi hiburan malam
 - dan melarang ART begadang

Pengungkapan kasus oleh BNNP Kaltim



Tahun 2017

No.	Satker	Jumlah Kasus	Jumlah Tsk.	Jumlah BB			
				Sabu	Ekstasi	Ganja	Kokain
1.	BNNP Kaltim	51	76	1.265,71 gram	21 butir	1.289 gram & 14 pohon	-
2.	BNNK Samarinda	20	26	170,85 gram	-	13 gram	-
3.	BNNK Balikpapan	18	26	41,06 gram	20 butir	-	3,34 gram
TOTAL		89	128	1.477,62 gram	41 butir	1.302 gram & 14 pohon	3,34 gram

Pengungkapan kasus oleh BNNP Kaltim



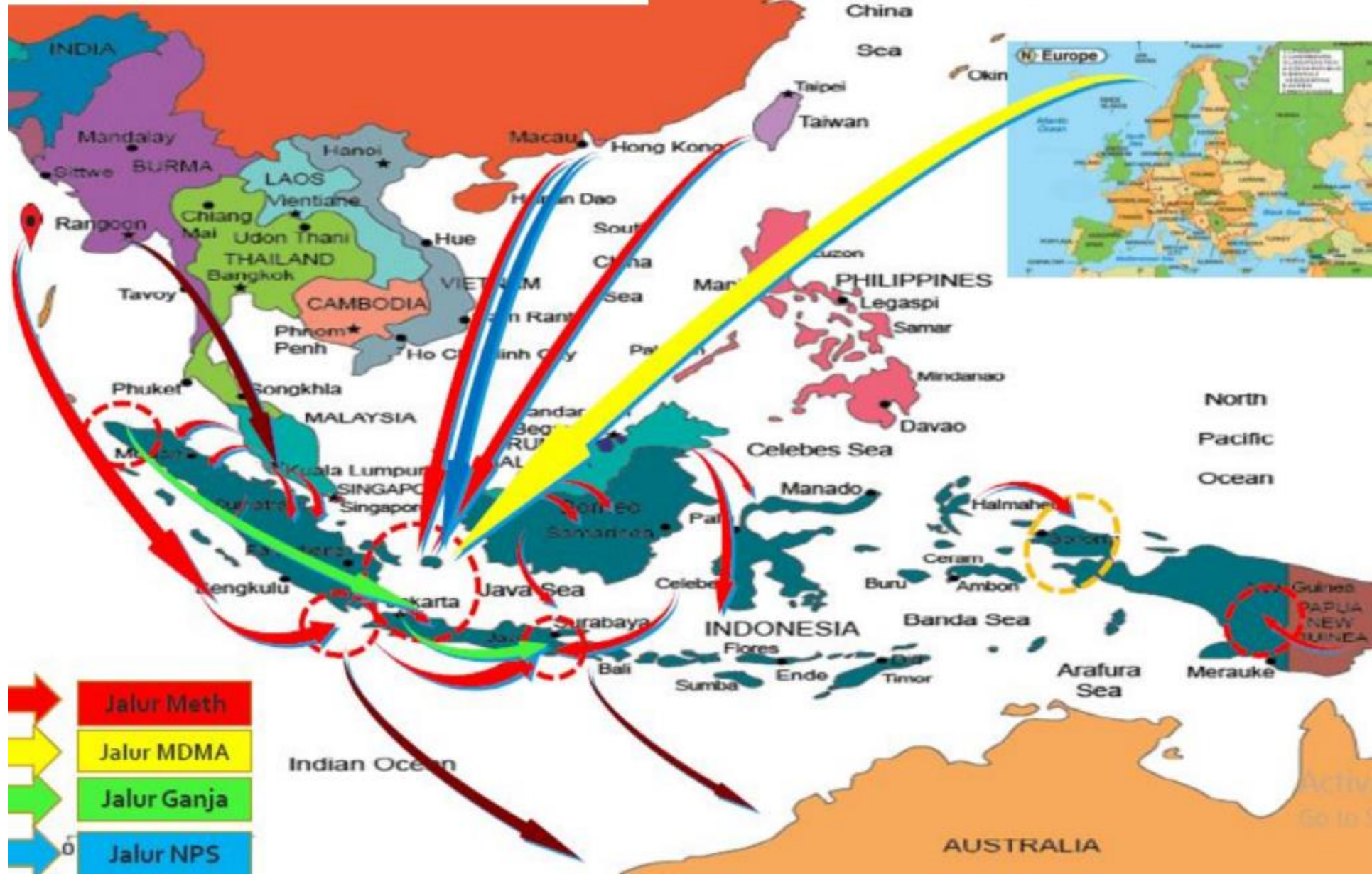
Tahun 2018

No.	Satker	Jumlah Kasus	Jumlah Tsk.	Jumlah BB			
				Sabu	Ekstasi	Ganja	Kokain
1.	BNNP Kaltim	53	79	847,79 gram	8 butir	14,65 gram	-
2.	BNNK Samarinda	17	25	129,14 gram	-	1.200,58 gram	-
3.	BNNK Balikpapan	16	24	1.095,1 gram	250 butir	-	-
TOTAL		86	128	2.072,03 gram	258 butir	1.215,23 gram	-

Catatan: Di tahun 2018, BNNP Kaltim melaksanakan 1 LKNTPPU

This map displays the geographical region of Southeast Asia and Oceania. Key features include:

- Major Islands and Archipelagos:** Philippines (Luzon, Mindanao), Indonesia (Sumatra, Java, Flores, Sumba), East Timor, Papua New Guinea, and the Solomon Islands.
- Seas and Oceans:** East China Sea, Celebes Sea, Banda Sea, Arafura Sea, and the North Pacific Ocean.
- Other Landmasses:** South Korea, Japan, and Australia.
- Inset Map:** A map of Europe is shown in the upper right, with a yellow arrow pointing from the Iberian Peninsula towards Southeast Asia, indicating a historical or trade route.
- Other Labels:** Taipei, Taiwan, Hong Kong, Manila, Legaspi, Samar, Davao, Manado, Palawan, Celebes, Flores, Ende, Sumba, Timor, Halmahera, Ceram, Ambon, Merauke, and Papua New Guinea.





Jalur Lundup Malaysia :

- Tawau -> Sebatik/Nunukan/ Tarakan
- Tawau -> Balikpapan
- Tawau -> Nunukan -> Pare-pare

Daerah Rawan Narkoba di Kaltim



No.	Kota/Kabupaten	Area
1.	Samarinda	Kel. Pelita – Samarinda Ilir, Kp. Sungai Dama – Jl. Otista, Jl. Pesut Gang I, II, III; Selili – Samarinda Ilir, Gang Masjid – Lambung Mangkurat, Ps. Segiri, Samarinda Seberang.
2.	Balikpapan	Kp. Baru Ulu, Pelabuhan Itci, Manggar Sari, Gn. Bugis, Gn. Tembak.
3.	Bontang	Prakla – Berbas Pantai, Bontang Kuala, Pelabuhan Loktuan, Tanjung Laut.
4.	Kutai Kartanegara	Handil, Muara Jawa, Pantai Pemedas – Samboja, Toko Lima – Muara Badak, Tenggarong Kota, Muara Kaman.
5.	Kutai Timur	Gang Jamaluddin, Kec. Sangatta Utara.
6.	Kutai Barat	Sendawar, Melak, Muara Lawa.

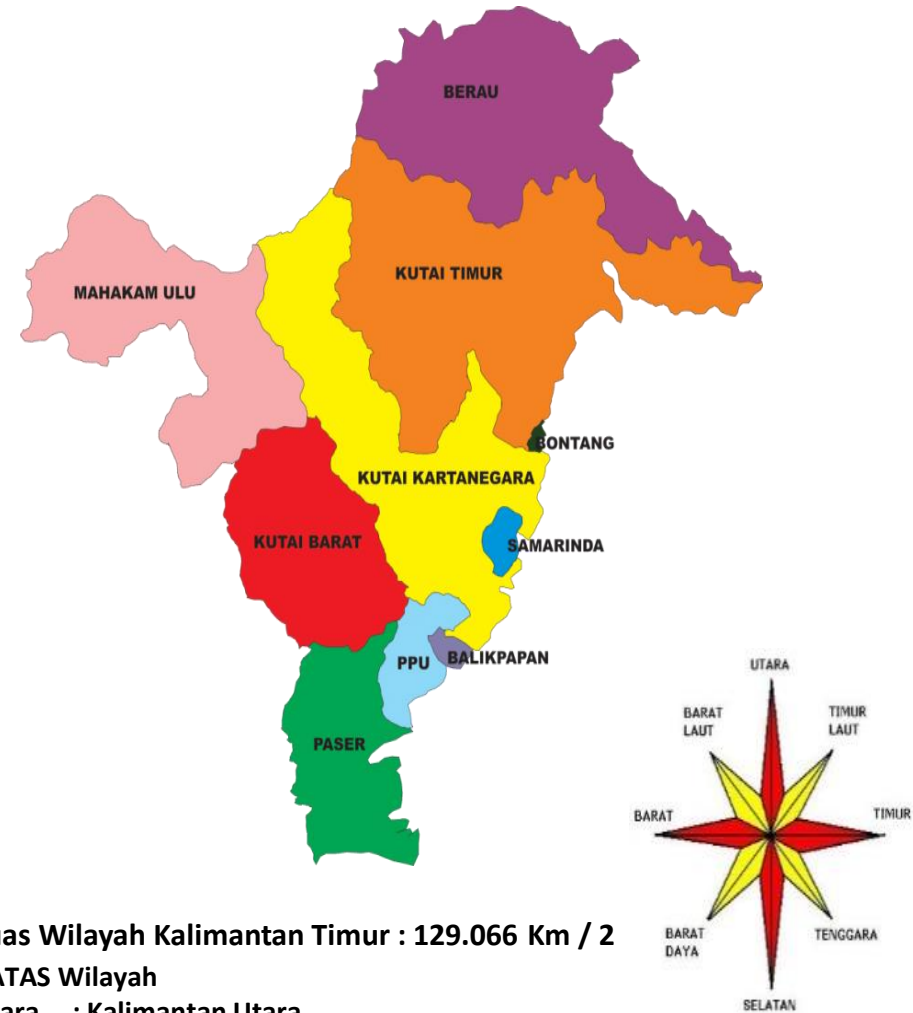
Daerah Rawan Narkoba di Kaltim



No.	Kota/Kabupaten	Area
7.	Penajam Paser Utara	Kel. Gersik, Long Ikis, Gang Padaidi, Desa Giri Mukti.
8.	Paser	Tanah Grogot, Batu Kajang, Batu Licin, Batu Sopang.
9.	Berau	Tanjung Redeb, Sambaliung, Tanjung Batu
10.	Mahakam Ulu	Pelabuhan Ujoh Bilang, Long Bangun, Batu Majang.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	KOTA / KABUPATEN	BNNK/BNK
1	SAMARINDA	BNNK
2	BONTANG	BNNK
3	BALIKPAPAN	BNNK
4	KUTAI TIMUR	BNK
5	PASER	BNK
6	BERAU	BNK
7	KUTAI BARAT	BNK
8	KUTAI KARTANEGARA	BNK
9	PENAJAM PASER UTARA	BNK
10	MAHAKAM ULU	BNK



Luas Wilayah Kalimantan Timur : 129.066 Km / 2

BATAS Wilayah

Utara : Kalimantan Utara

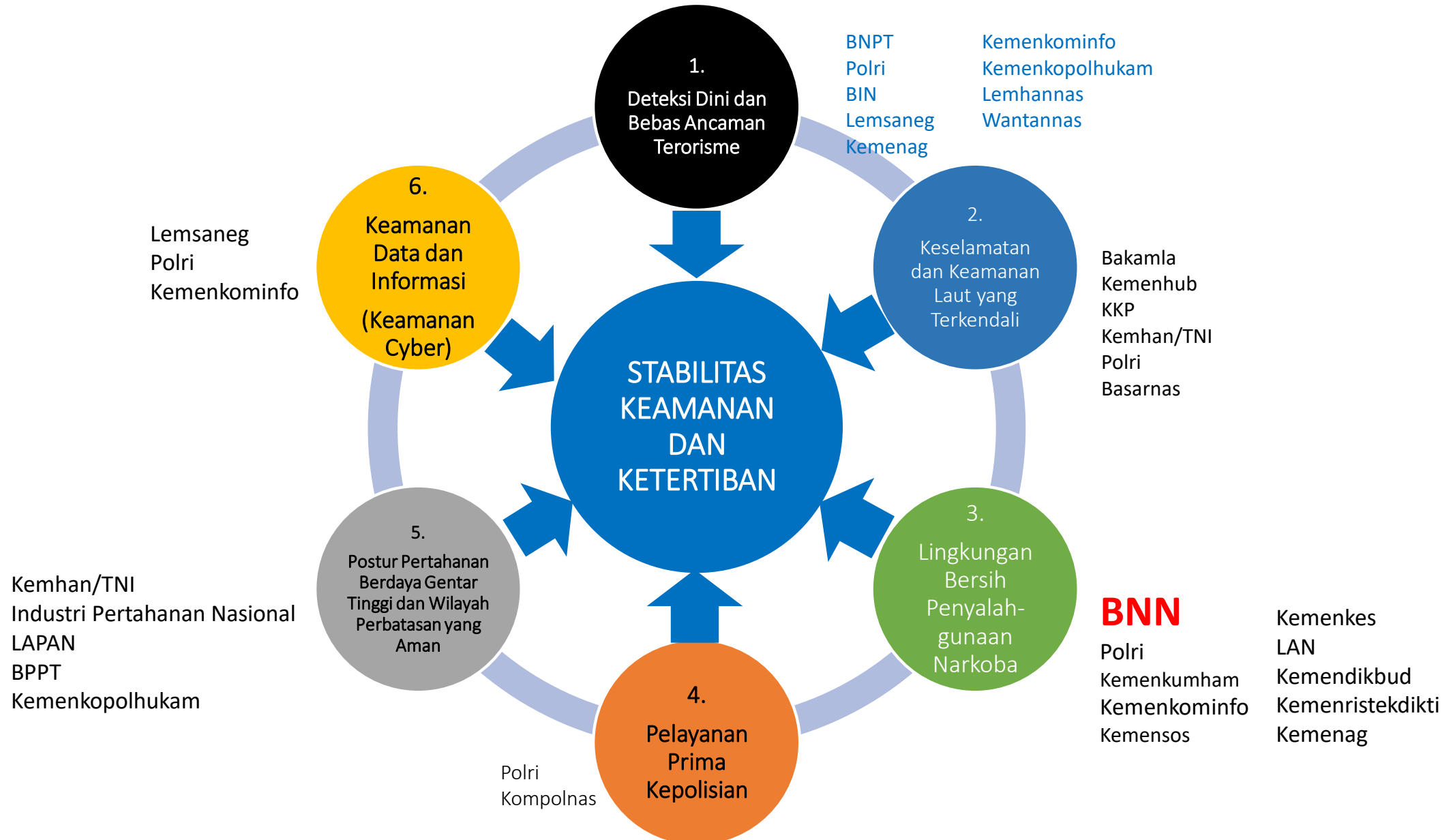
Barat : Provinsi Kalimantan Barat / Provinsi Kalimantan Tengah

Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan

Timur : Laut Sulawesi / Selat Makassar / Pulau Sulawesi

PRIORITAS NASIONAL RKP 2018

STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN



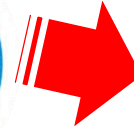
Aktor Permasalahan Narkoba



PENGEDAR
(MAKIN AKTIF)



MASYARAKAT SEHAT
(MAKIN TERANCAM)



PECANDU
(MAKIN MENINGKAT)



Aktor Permasalahan Narkoba



SUPPLY REDUCTION



DEMAND REDUCTION



HARM REDUCTION



ARAH KEBIJAKAN P4GN

1. Menjadikan 97,8 % penduduk Indonesia **imun** terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba

DEMAND REDUCTION

2. Menjadikan 2,2 % penduduk Indonesia (penyalahguna narkoba) secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui rawat inap atau rawat jalan serta mencegah kekambuhan dengan program *after care* (rawat lanjut).

HARM REDUCTION

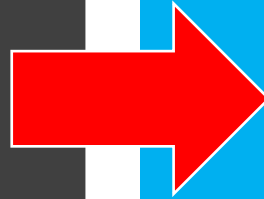
3. Menumpas jaringan sindikat narkoba hingga ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan sindikat narkoba dalam dan/atau luar negeri dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkotika melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.

SUPPLY REDUCTION

Pokok Instruksi Presiden



1. Menteri Kabinet Kerja
2. Sekretaris Kabinet
3. Jaksa Agung
4. Kapolri
5. Panglima TNI
6. Kepala BIN
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
9. Gubernur



Melaksanakan Rencana
Aksi Nasional P4GN Tahun
2018 – 2019

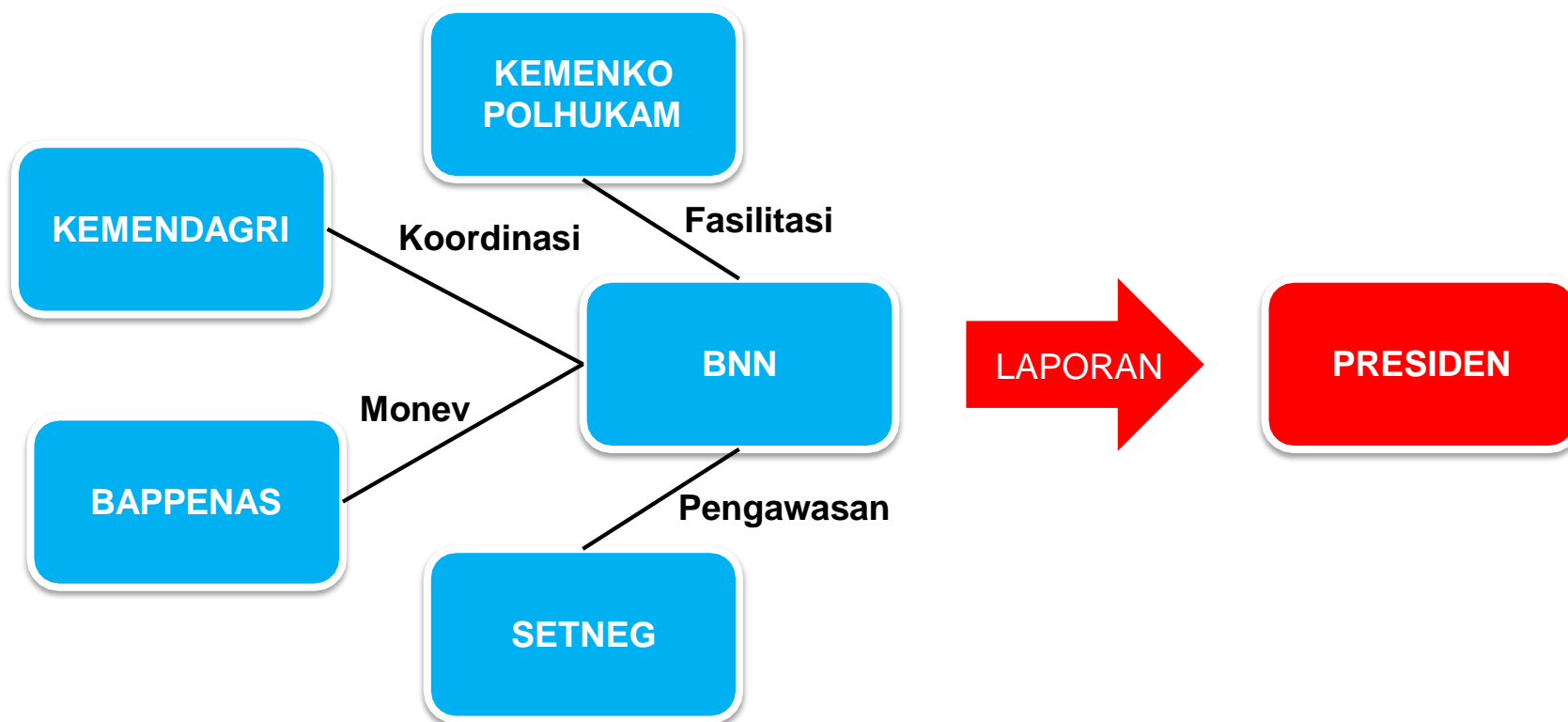
DAN

Melaporkan hasil
pelaksanaan kepada
Presiden melalui Kepala
BNN setiap akhir tahun
anggaran

10. Bupati/ Walikota

Pelaksanaan Inpres dibiayai oleh APBN K/ L, APBD & sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan UU.

Alur Koordinasi



- ❖ Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan P4GN di Lingkungan Instansi Pemerintah
- ❖ Peraturan Daerah Prov. Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.1. Kampanye Publik tentang Bahaya Narkoba

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN Kepada ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri	BNNP Kaltim dan Pemprov Kaltim	Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh K/L & Pemda setempat
2	Pembentukan regulasi tentang P4GN di masing-masing K/L & Pemda	BNNP Kaltim	Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup K/L & Pemda setempat
3	Penyelenggaraan Hari Remaja Internasional pada tingkat pusat & provinsi	BNNP Kaltim	BKKBN dan DPPKB	Terselenggaranya Hari Remaja Internasional pada tingkat provinsi
4	Promosi Gerakan Berencana (GenRe) di sekolah, kampus, & kampung Keluarga Berencana	BNNP Kaltim	BKKBN dan DPPKB	Terselenggaranya promosi GenRe di sekolah, kampus, & kampung Keluarga Berencana

1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.1. Kampanye Publik tentang Bahaya Narkoba

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
5	Promosi GenRe berbasis komunitas	BNNP Kaltim	BKKBN dan DPPKB	Terselenggaranya Promosi GenRe berbasis komunitas
6	Sosialisasi P4GN pada sarana & prasarana transportasi serta moda transportasi	BNNP Kaltim	Dinas Perhubungan	Terpasangnya slogan “Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika” dg penempatan yg strategis pd sarana & prasarana serta moda transportasi
7	Penguatan dukungan ekologi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	BNNP Kaltim	Dinas Sosial	Terselenggaranya sistem dukung ekologi sosial bagi para PKMS
8	Pembinaan & Penyebarluasan P4GN kepada seluruh BUMD	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- BUMD- Pemkot dan Pemkab	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada jajaran komisar, direksi, & karyawan BUMD

1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.1. Kampanye Publik tentang Bahaya Narkoba

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
9	Pembinaan & penyebarluasan P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Perindustrian- Dinas Perdagangan- Dinas Kesehatan	Tersebarluasnya informasi P4GN kepada instansi (sektor) yang menggunakan bahan-bahan Prekursor Narkotika
10	Penguatan pemberdayaan masyarakat dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA di daerah rawan & rentan pd daerah tertinggal, terdepan, & terluar	BNNP Kaltim	Dinas Sosial	Terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani
11	Penutupan situs jual beli Narkotika & Prekursor Narkotika & situs yang melegalisasi Narkotika & Prekursor Narkotika	BNNP Kaltim	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tertutupnya situs jual beli Narkotika & Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan

1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.2. Deteksi Dini Lahgun Narkotika dan Prekursor

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pelaksanaan tes urine kepada seluruh Pegawai ASN, termasuk Calon ASN	BNNP Kaltim	Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Terlaksananya tes urine kepada seluruh Pegawai ASN yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BNN dan/atau BNNP dan/atau BNN Kabupaten/Kota
2	Pembentukan Satuan Tugas/ Relawan Anti Narkotika & Prekursor Narkotika	BNNP Kaltim	Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika & Prekursor Narkotika

1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pengembangan & penerapan modul pendidikan anti narkotika & prekursor narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- LAN- Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Terlaksananya penerapan modul pendidikan anti narkotika pada seluruh pendidikan kedinasan
2	Penyusunan modul anti narkotika & prekursor narkotika untuk latihan dasar, pendidikan & pelatihan kepemimpinan, teknis, dan fungsional	BNNP Kaltim	LAN	Tersusunnya modul anti narkotika & prekursor narkotika untuk latihan dasar, pendidikan & pelatihan kepemimpinan, teknis, dan fungsional
3	Pengembangan topik anti narkotika & prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah.	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Pendidikan- Kanwil Kementerian Agama	Terakomodasinya topik anti narkotika & prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah & perguruan tinggi

1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.3. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4	Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada lembaga layanan yg berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak terkait upaya pencegahan & penanganan narkotika & prekursor narkotika pada anak	BNNP Kaltim	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Terlatihnya sumber daya manusia pada lembaga layanan yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

1. PENCEGAHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.4. Pemberdayaan Masyarakat

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti narkoba & prekursor narkoba	BNNP Kaltim	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Meningkatnya pengetahuan & pemahaman pemuda mengenai bahaya narkoba & prekursor narkoba serta penanggulangannya
2	Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan & rentan narkoba & prekursor narkoba	BNNP Kaltim	Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Terselenggaranya pemberdayaan potensi masyarakat pada kawasan rawan & rentan narkoba & prekursor narkoba

PEMBERANTASAN



2.1. Pembersihan Tempat & Kawasan Rawan Edar Gelap Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pengumpulan informasi terkait tindak pidana narkoba & prekursor narkoba serta TPPU terkait narkoba & prekursor narkoba	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KANWIL KEMENKEU - KANWIL KEMKUMHAM - KEJATI - POLDA, POLRES - BINDA 	Terpetakan jaringan narkoba & prekursor narkoba
2	Penyelamatan aset yg berasal dari tindak pidana narkoba & prekursor narkoba dan/atau TPPU terkait narkoba & prekursor narkoba	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KANWIL KEMENKEU - KANWIL KEMKUMHAM - KEJATI - POLDA, POLRES - BINDA 	Meningkatnya jumlah aset sitaan yg berasal dari tindak pidana narkoba & prekursor narkoba dan/atau pencucian uang terkait narkoba & prekursor narkoba
3	Pengoordinasian asosiasi penyedia jasa keuangan dlm rangka meningkatkan kesadaran PJK & kualitas LTKM (Lap. Transaksi Keu. Mencurigakan) terkait dugaan TP narkoba & prekursor narkoba	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KEMENKEU - KEMENDAG - KEMEN KOPERASI & UKM - PPATK 	Meningkatnya kesadaran PJK & kualitas LTKM

2.1. Pembersihan Tempat & Kawasan Rawan Edar Gelap Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4	Penyesuaian penilaian risiko sektoral terhadap risiko TPPU yg berasal dari tindak pidana narkotika & prekursor narkotika	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KANWIL KEMENKEU - KEJATI - POLDA, POLRES - TNI - BINDA 	Tersedianya penilaian risiko sektoral terhadap risiko TPPU yg berasal dari tindak pidana narkotika & prekursor narkotika
5	Pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan narkotika & prekursor narkotika internasional	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KANWIL KEMENKEU - KANWIL KEMKUMHAM - KEJATI - POLDA, POLRES - TNI - BINDA 	Meningkatnya jumlah pertukaran informasi dengan <i>foreign counterpart</i> dalam rangka pengungkapan jaringan narkotika & prekursor narkotika internasional

2.1. Pembersihan Tempat & Kawasan Rawan Edar Gelap Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
6	Mengefektifkan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan terhadap tindak pidana narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait tindak pidana narkotika & prekursor narkotika, serta peningkatan pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KANWIL KUMHAM - KANWIL KEMENKEU - DINAS PERHUBUNGAN - DINAS PERTANIAN - KEJATI - POLDA, POLRES - TNI - BINDA - BNPP (BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN) - BAKAMLA 	Terlaksananya kegiatan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan tindak pidana narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika, serta pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia
7	Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KANWIL KUMHAM - POLRES - TNI 	Terlaksananya pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara optimal

2.1. Pembersihan Tempat & Kawasan Rawan Edar Gelap Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
8	Penanganan tindak pidana narkotika & prekursor narkotika serta TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KEJATI - POLDA, POLRES 	Selesainya penanganan tindak pidana narkotika & prekursor narkotika serta TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika
9	Penyelesaian penanganan tindak pidana narkotika & prekursor narkotika serta TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika yg telah berkekuatan hukum tetap	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - KEJATI - KANWIL KEMKUMHAM 	Eksekusi terhadap tindak pidana narkotika & prekursor narkotika serta TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika yg telah berkekuatan hukum tetap
10	Pemetaan & pemusnahan ladang ganja	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - DINAS PERTANIAN - POLDA, POLRES - TNI - BIG (BADAN INFORMASI GEOSPASIAL) - LAPAN - PEMERINTAH KABUPATEN 	Terpetakan dan musnahnya ladang ganja

2.2. Penguatan Was Pintu Masuk (Bandara, Pelabuhan, Lintas Batas, dll.)

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Modernisasi alat pendukung operasi narkotika & prekursor narkotika serta penguatan unit anjing pelacak Dirjen Bea & Cukai Kemenkeu	BNNP Kaltim	KANWIL BEA CUKAI Kaltim	Terwujudnya sarana & prasarana Dirjen Bea & Cukai Kemenkeu yang modern & terstandarisasi di bidang pengawasan narkotika & prekursor narkotika
2	Penerapan Customs Narcotics Targetting Centre	BNNP Kaltim	KANWIL BEA CUKAI Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanan di bidang narkotika & prekursor narkotika secara nasional - Tersedianya standar analisis untuk penetapan pelanggaran kepabeanan di bidang narkotika & prekursor narkotika

2.3. Pembentukan Rutan Narkotika

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pembentukan Rumah Tahanan Narkotika	BNNP Kaltim	KANWIL KEMKUMHAM	Terbentuknya Rumah Tahanan Narkotika

2.4. Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Pembentukan sistem interdiksi terpadu	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- KANWIL KEMENKEU- KANWIL KUMHAM- DISHUB- DINKES- DINAS PERTANIAN- DISKOMINFO- POLDA, POLRES- TNI- BINDA	Terbentuknya sistem interdiksi terpadu untuk meningkatkan koordinasi & kerjasama lintas negara guna memutus jaringan sindikat narkoba & prekursor narkoba, nasional maupun internasional

KEGIATAN RESIDEN

DAILY ACTIVITIES



3. REHABILITASI



3.1. PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN REHABILITASI

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- DINKES- DINSOS	Tersusunnya standarisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional
2	Penyediaan layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, & kota	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- DINKES- DINSOS- POLDA, POLRES- TNI- PEMPROV, PEMKOT, PEMKAB	Tersedianya layanan rehabilitasi di setiap provinsi, kabupaten, & kota yang sesuai standar
3	Penyediaan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- DINKES- DINSOS- KANWIL KUMHAM- POLDA, POLRES- TNI- PEMPROV, PEMKOT, PEMKAB	Tersedianya sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi yang kompeten

3. REHABILITASI



3.1. PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN REHABILITASI

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
4	Pendampingan anak korban, anak saksi, dan anak penyalah guna narkoba & prekursor narkoba	BNNP Kaltim	DINAS PPA	<ul style="list-style-type: none">- Pendampingan anak korban & anak saksi penyalahgunaan narkoba & prekursor narkoba oleh lembaga layanan di lingkungan KEMENPPPA- Pendampingan anak penyalah guna narkoba & prekursor narkoba dalam menghadapi proses hukum
5	Penatalaksanaan penyelenggaraan layanan rehabilitasi berbasis bukti	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- DINKES- DINSOS- POLDA, POLRES	Tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan rehabilitasi

3. REHABILITASI



3.1. PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN REHABILITASI

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
6	Penyusunan regulasi layanan rehabilitasi yang berkelanjutan	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- KANWIL KEMKUMHAM- DINKES- DINSOS- PEMPROV, PEMKOT, PEMKAB- POLDA, POLRES	Tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan
7	Penyusunan sistem informasi rehabilitasi secara terpadu dan nasional	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- KANWIL KEMKUMHAM- DINKES- DINSOS- PEMKAB- DISKOMINFO	Tersedianya sistem informasi rehabilitasi

3. REHABILITASI



3.2. PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PASCA REHABILITASI

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan & kewirausahaan)	BNNP Kaltim	<ul style="list-style-type: none">- DISNAKER- DINAS KELAUTAN & PERIKANAN- KANWIL KEMENHAN- DINAS KEHUTANAN & LH- DINAS DIKBUD- KEMRISTEK DIKTI- BADAN EKONOMI KREATIF	Terselenggaranya kegiatan vokasional (pendidikan keterampilan & kewirausahaan)

INTEGRASI DATA

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN
a	Penyediaan data terkait P4GN	BNNP Kaltim	Seluruh K/ L vertikal, Pemprov, Pemkot, Pemkab, dan Dinas-Dinas	Tersedianya data P4GN
b	Penyediaan aplikasi integrasi data terkait P4GN	BNNP Kaltim	DISKOMINFO	Tersedianya aplikasi integrasi data terkait P4GN

SINERGITAS BNN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN INHALAN**

**PERATURAN DAERAH PROV. KALIMANTAN TIMUR
NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



**PENDIDIKAN ANTI NARKOBA TELAH DIMASUKKAN
KEDALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**SURAT GUBERNUR KALTIM NO. 440/ 6011/
BKP.III/ XI/ 201 kepada SELURUH OPD
untuk MELAKSANAKAN TES URINE bagi
SELURUH ASN**

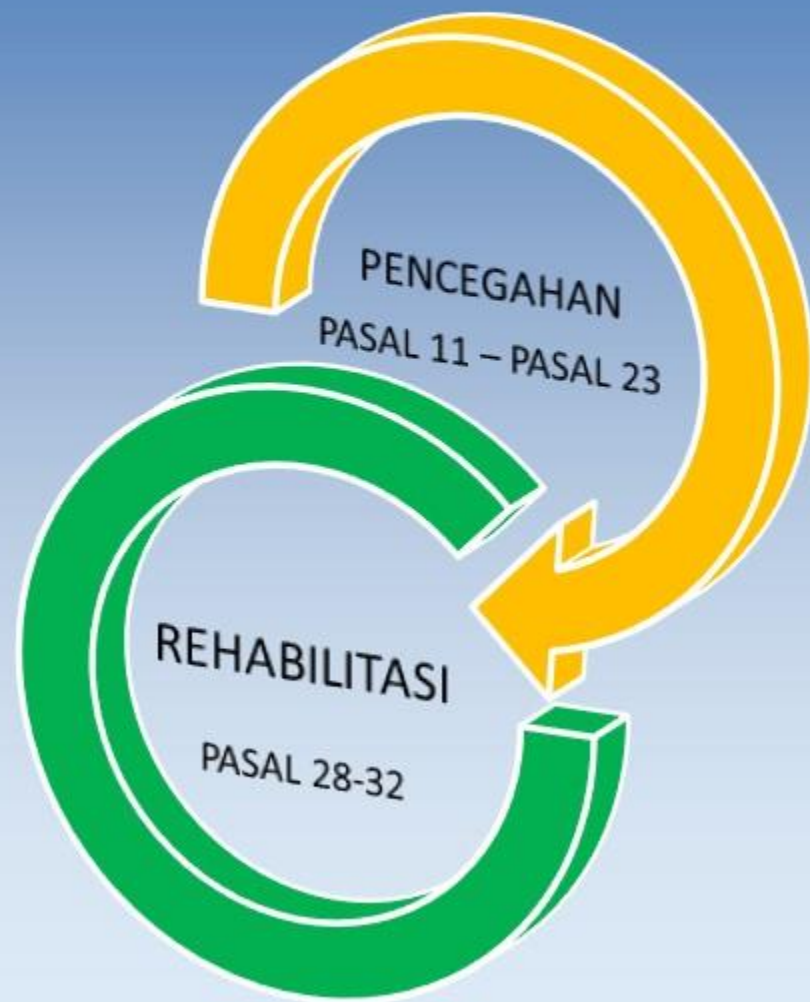
**PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NO. 7 TAHUN 2017**

TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

TUJUAN :

A. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
MASYARAKAT DARI ANCAMAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

B. MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA



PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NO. 7 TAHUN 2017

TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



PENCEGAHAN

PASAL
11
KELUARGA

PASAL 12
LINGKUNGAN
MASYARAKAT

PASAL 13 - 14
LINGKUNGAN
PENDIDIKAN

PASAL 15
ORAGANISASI
MASYARAKAT

PASAL 16-19
INSTANSI PEMDA,
LEMBAGA PEMERINTAH,
DAN DPRD

PASAL 20
BADAN USAHA

PASAL 21
ASRAMA DIBAWAH
BINAAN PROVINSI KALTIM

PASAL 22
TEMPAT IBADAH

PASAL 23
MEDIA MASSA

**PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
NO. 7 TAHUN 2017
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**



REHABILITASI

PASAL 32 – 33
PASCA
REHABILITASI

PASAL 29 - 31
TEMPAT
REHABILITASI

PASAL 24 - 27
IPWL



KONSEP 5W1H PENJABARAN FORMAT F8 KOLOM

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (B03, B06, B09, B12)	% PENCAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. BIDANG PENCEGAHAN							
1. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika							
a. Sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang P4GN kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Badan Narkotika Nasional Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel: ----- Kementerian Dalam Negeri Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Nama: Jabatan: Nomor Hp: Surel:	Tersosialisasikannya informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. WHAT Apa Sasaran Bersama?	U1 : "Tersediany a, dsb" U2: "Terlaksananya a, dsb" WHY Agar Apa yg dilakukan K/L menghasilkan : U1 : Tersedianya U2 : Terlaksananya	B03: WHAT Apa yg K/L lakukan di B03? B06: WHAT Apa yg K/L lakukan di B06? B09: WHAT Apa yg K/L lakukan di B09? B12: WHAT Apa yg K/L lakukan di B12?	B03: % B06: % B09: % B12: %	WHERE HOW Hasil? Kendala? WHEN Periode Pelaporan

WHO

- Siapa Pelaksana?
- Siapa Penanggung Jawab?

RELEVANSI?

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
A		FORKORPIMDA	
	1	Gubernur Prov. Kaltim	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN di K/L & Pemda setempat.
	2	DPRD Prov. Kaltim	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN di K/L & Pemda setempat.
	3	Kodam VI/ Mulawarman	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; pemetaan jaringan narkotika; pelaksanaan TPPU; kegiatan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan TP narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika, serta pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia; pengawasan Lapas; terbentuk Sistem Interdiksi Terpadu di K/L & Pemda setempat.

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
A		FORKORPIMDA	
	4	Polda Kaltim	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; pemetaan jaringan narkotika; pelaksanaan TPPU; kegiatan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan TP narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika, serta pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia; pengawasan Lapas; terbentuk Sistem Interdiksi Terpadu di K/L & Pemda setempat.
	5	Pengadilan Tinggi	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN di K/L & Pemda setempat.
	6	Kejaksaan Tinggi	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN di K/L & Pemda setempat.

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
B		Badan di Lingk. Prov. Kaltim	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN
	1	Bappeda	
	2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	3	Badan Kesbangpol	
	4	BKD	
	5	Badan Pengembangan SDM	
	6	Badan Pendapatan Daerah	
	7	Balitbangda	
	8	BPBD	

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
B		Badan di Lingk. Prov. Kaltim	
	1	RSUD AW Syharanie - Samarinda	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; Layanan Rehabilitasi standar nasional; tersedianya SDMpelaksana rehabilitasi yang kompeten; tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan rehabilitasi; tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan; tersedianya sistem informasi rehabilitasi.
	2	RSUD dr. Kanujoso Djatibowo - Balikpapan	
	3	RSJD Atma Husada	

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
C		Dinas di Lingk. Prov. Kaltim	
	1	Dinas Perkebunan	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	2	Dinas Peternakan dan Kesehatan	
	3	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	4	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan; tersedianya data P4GN; terlatihnya SDM tentang P4GN pada layanan-layanan publik; pendampingan anak dan keluarga korban penyalahgunaan narkoba
	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	6	Dinas Kehutanan	
	7	Dinas Pangan	

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
C		Dinas di Lingk. Prov. Kaltim	
	8	Dinas Pariwisata	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	9	Dinas ESDM	
	10	Dinas PU	
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
	12	Dinas Sosial	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; terselenggaranya sistem dukung ekologi sosial bagi para PKMS; terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani; Layanan Rehabilitasi standar nasional; tersedianya SDM pelaksana rehabilitasi yang kompeten; tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan rehabilitasi; tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan; tersedianya sistem informasi rehabilitasi.

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
C		Dinas di Lingk. Prov. Kaltim	
	13	Dinas Kesehatan	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; terselenggaranya sistem dukung ekologi sosial bagi para PKMS; terbentuknya jejaring masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memetakan permasalahan penyalahgunaan NAPZA secara madani; Layanan Rehabilitasi standar nasional; tersedianya SDM pelaksana rehabilitasi yang kompeten; tersusunnya tata laksana penyelenggaraan layanan rehabilitasi; tersusunnya regulasi layanan rehabilitasi berkelanjutan; tersedianya sistem informasi rehabilitasi.
	14	Dinas Lingkungan Hidup	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN di K/L & Pemda setempat.
	15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	16	Disnaker	

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
C		Dinas di Lingk. Prov. Kaltim	
	17	Dinas Pendidikan	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; Kurikulum P4GN.
	18	Diskominfo	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; tertutupnya situs jual beli Narkotika & Prekursor Narkotika di media sosial yang dilaporkan; terbentuk Sistem Interdiksi Terpadu, terbentuk Sistem Informasi Rehabilitasi; tersedia integrasi data P4GN.
	19	Dispora	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; pelaksanaan pelatihan kader Pemuda Anti Narkoba.

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
D		Instansi Vertikal	
	1	Kanwil Kementerian Agama	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; Kurikulum P4GN.
	2	Kanwil Kemkumham	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; pemetaan jaringan narkotika; pelaksanaan TPPU; kegiatan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan TP narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika, serta pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia; pengawasan Lapas; terbentuk Sistem Interdiksi Terpadu di K/L & Pemda setempat.
	3	Kanwil Badan Pertanahan Nasional	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
D		Instansi Vertikal	
	4	Perwakilan BPK	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	5	BPKP	
	6	BKKBN	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; terselenggara Hari Remaja Internasional dan kegiatan GenRe.
	7	BIN	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; pemetaan jaringan narkotika; pelaksanaan TPPU; kegiatan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan TP narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika, serta pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia; pengawasan Lapas; terbentuk Sistem Interdiksi Terpadu di K/L & Pemda setempat.
	8	Univ. Mulawarman	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; Kurikulum P4GN.

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
D		Instansi Vertikal	
	9	TVRI	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; terbentuk Sistem Informasi Rehabilitasi; tersedia integrasi data P4GN.
	10	RRI	
	11	Balai Besar POM	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	12	Kantor Pertahanan Prov. Kaltim	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN; pemetaan jaringan narkotika; pelaksanaan TPPU; kegiatan intelijen narkotika, penangkapan DPO, penyelidikan & penyidikan TP narkotika & prekursor narkotika dan TPPU terkait narkotika & prekursor narkotika, serta pengawasan lalu lintas orang & barang ke & dari Indonesia; pengawasan Lapas; terbentuk Sistem Interdiksi Terpadu dan integrasi pengawasan kepabeanan di K/L & Pemda setempat.
	13	Kanwil Bea Cukai	

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
D		Instansi Vertikal	
	14	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II – Samarinda	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	15	Kantor Imigrasi Kelas 1A – Samarinda	
	16	Baristand - Samarinda	

Uraian Rencana Aksi



No.		Instansi	Rencana Aksi
E		Pemerintah Kota/ Kabupaten	
	1	Pemkot Samarinda	Sosialisasi P4GN, regulasi P4GN; tes urine; Satgas Anti Narkotika; kurikulum P4GN pada pendidikan teknis; pemberdayaan masyarakat di daerah rawan dan tersedianya data P4GN.
	2	Pemkot Balikpapan	
	3	Pemkot Bontang	
	4	Pemkab Kutai Kartanegara	
	5	Pemkab Kutai Timur	
	6	Pemkab Kutai Barat	
	7	Pemkab Penajam Paser Utara	
	8	Pemkab Paser	
	9	Pemkab Berau	
	10	Pemkab Mahakam Ulu	



SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH